

Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Rika Viara^{1*}, Lilik Pujiati²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara

*Korespondensi : Rikaviara9@Gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang diantaranya yaitu masih lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Daerah yang merupakan sumber keuangan untuk membiayai Belanja Daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi dan perhitungan beberapa rasio. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari segi analisis varians sudah dapat memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan. Dari segi efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan sangat efektif serta Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sangat efisien. Dilihat dari rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi masih sangat rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang belum mampu mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga masih sangat tergantung terhadap pendapatan transfer/ dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengelola potensi maupun sumber daya yang tersedia agar Kabupaten Jombang menjadi Kabupaten mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kata Kunci : APBD, Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The problems faced by the Regional Government of Jombang Regency include the still weak ability of Local Revenue, so that it will have a direct effect on Regional Income which is a financial source to finance Regional Expenditures. The purpose of this study was to analyze and provide an explanation of the ability of Local Revenue in meeting Regional Expenditures in the Regional Government of Jombang Regency. The analytical method used is a qualitative method using triangulation techniques and calculation of several ratios. The results of this study explain that the ability of Jombang Regency Original Revenue in terms of analysis of variance has been able to meet the needs of funds in the implementation of Government tasks. In terms of effectiveness of Regional Revenue, the Regional Government of Jombang Regency was declared very effective and Regional Expenditures in the Regional Government of Jombang Regency were very efficient. Judging from the financial ratio in this case, the degree of decentralization is still very low. The Regional Government of Jombang Regency has not been able to manage and optimize its Regional Original Income, so it is still very dependent on the transfer income / balance funds from the Central Government. It is better for the Jombang Regency Government to try to increase its Regional Original Income by exploring, developing and managing the potential and available resources so that Jombang Regency becomes an independent Regency without a large dependence on funding assistance from the Central and Provincial Governments.

Keywords: Regional Budget, Regional Expenditures, Jombang District Government, Local Revenue.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, dengan jumlah penduduk 260 juta orang yang tersebar pada 17.558 pulau, hidup dalam sembilan belas lingkungan hukum adat, dan terdiri dari kurang lebih 300 etnik. Selain itu luas wilayah Indonesia terdiri dari luas wilayah daratan 1.99.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan ± 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai ± 7,3 juta km persegi. Jadi bisa dikatakan

perbandingan luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan sekitar 1 : 3 dan sangat jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau- pulau tersebut satu dengan yang lainnya sehingga pulau satu dengan pulau lainnya tidak terisolasi. Untuk dapat melancarkan jalannya sistem administrasi negara secara berdayaguna dan berhasilguna, maka tepatlah kiranya para pendiri negara ini memutuskan kalau wilayah Indonesia dibagi-bagi dalam wilayah yang lebih kecil. Hal tersebut terbukti dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang- Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah- daerah yang bersifat istimewa”. Agar dapat mewujudkan keinginan tersebut, maka telah dikeluarkan Undang- Undang mengenai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945. Sampai dengan saat ini Undang- Undang yang masih berlaku adalah Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam Undang- Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten atau Kota diselenggarakan dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Dari hal tersebut Kabupaten Jombang dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah sumber utamanya berasal dari pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain- lain yang sah. Adapun komponen pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia Ristia Kaeng dan David P. E Saerang (2015) dari Universitas San Ratulangi Manado dengan judul “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon”. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Disini peneliti menggunakan objek penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menuangkannya dalam judul skripsi yang berjudul :“ Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Besarnya Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

Manfaat yang dapat diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi sektor publik, sehingga dapat mengetahui pentingnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pemenuhan belanja daerah.

2) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memanfaatkannya untuk belanja daerah yang lebih efektif.

B. Landasan Teori Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang - Undang”. Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di jaman globalisasi ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. Menurut Saragih (2008: 127), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan pemerintah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemerintah Daerah harusnya berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan Riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing Daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.

Disiplin anggaran APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meniggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2009 : 132) “pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari beberapa sektor yaitu sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain - lain yang sah”. Di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *withholding system*. Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKKB), apabila setelah diterbitkan SKPKKB berdasarkan data baru ternyata masih ada pajak daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKKBT).

Belanja Daerah

Menurut Abdul Halim biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deflasi aset, atau bisa dikatakan terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para ekuitas dana. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok antara lain Belanja Administrasi Umum, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja pemeliharaan, Belanja Operasional, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tak Disangka.

Teori Khusus

Penelitian ini mengenai Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Membiayai Besarnya Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Salah satunya dilakukan oleh Aprislia Ristia Kaeng dan David P. E Saerang melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Perlu diketahui bahwasanya Dana Perimbangan bisa disebut dengan pendapatan transfer. Hal ini berpedoman pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*,

yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

C. Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta teori – teori dalam pembahasan maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana dalam hal ini dijelaskan beberapa pengertian menurut para ahli. Satori dkk (2011: 25) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Jombang.

Tabel 1. Operasional Variabel dan Indikator Variabel

Operasional Variabel	Indikator Variabel
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain – Lain PAD yang Dipisahkan
Belanja Daerah	Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Teknik Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.

Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Selisih lebih pendapatan merupakan selisih menguntungkan (*Favourable Variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*Unfavourable Variance*). Berikut ini rumus untuk menghitung analisis varians Pendapatan daerah (Halim, 2007) :

$$\text{Persentase Varians} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Rasio dirumuskan Desentralisasi Fiskal dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Bisma dan Susanto, 2010

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Desentralisasi Fiskal

Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Rasio Desentralisasi
00,00% – 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam (Bisma, 2010)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mardiasmo (2009 : 165)

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri– Fisipol UGM, 2010

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2002:234)

Tabel 4. Kriteria Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:166) :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi

lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

D. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Varians

Realisasi anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan jumlah yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Berikut ini merupakan data anggaran pendapatan dan realisasi anggaran Pendapatan yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 :

Tabel 5. Varians Realisasi Anggran Pendapatn dan Anggaran Pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varians Pendapatan	Kriteria Kemampuan
2012	1.439.221.547.802,76	1.397.450.431.602,18	41.771.116.200,58	<i>Fovorable</i>
2013	1.567.610.980.536,59	1.572.846.963.948,00	5.235.983.411,41	<i>Unfavorable</i>
2014	1.905.860.371.275,38	1.799.761.921.253,97	106.098.450.021,41	<i>Favorable</i>
2015	2.151.287.874.052,96	2.135.865.342.084,20	15.422.531.968,76	<i>Favorable</i>
2016	2.257.099.357.781,47	2.234.904.907.100,67	22.194.450.680,80	<i>Favorable</i>
2017	2.517.003.141.056,17	2.534.376.986.170,68	(17.373.845.114,51)	<i>Unfovarable</i>

Sumber : Data Diolah, 2018

Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang selama enam tahun terakhir dinyatakan baik. Hal ini terlihat dari varians pendapatan yang ditunjukkan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih yang diharapkan (*Favourable Variance*). Varians pendapatan yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp. 17.373.845.114,51, sedangkan varians pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp. 41.771.116.200,58. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010 : 137) yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Derajat Desentralisasi

Capaian hasil perhitungan Derajat Desentralisasi akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan kriteria berikut ini :

Tabel 6. Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 - 2017

Tahun	Realisasi PAD	Keterangan		Kriteria Kemampuan
		Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (4)=(2):(3)*100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	164.389.353.734,76	1.439.221.547.802,76	5%	Sangat Kurang
2013	185.091.678.239,59	1.567.610.980.536,59	11%	Kurang
2014	304.065.301.093,38	1.905.860.371.275,38	15%	Kurang
2015	363.963.252.971,96	2.151.287.874.052,96	16%	Kurang
2016	374.141.185.825,47	2.257.099.357.781,47	16%	Kurang
2017	521.236.583.750,17	2.517.003.141.056,17	20,7%	Cukup

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2012 : 5%, 2013 : 11%, 2014 : 15%, 2015 : 16%, 2016 : 16%, 2017 : 20,7%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki masih rendah. Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah 14% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasinya kurang.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 7. Perhitungan Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2012 - 2017

Tahun	Pendapatan Transfer	Keterangan		Kriteria Kemampuan
		Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan (4)=(2):(3)*100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	997.447.923.900	1.439.221.547.802,76	70%	Sangat Tinggi
2013	1.060.053.279.863	1.567.610.980.536,59	67%	Sangat Tinggi
2014	1.131.290.917.695	1.945.860.371.275,38	59%	Sangat Tinggi
2015	1.617.503.926.481	2.151.287.874.052,96	75%	Sangat Tinggi
2016	1.656.569.041.857	2.257.099.357.781,47	73%	Sangat Tinggi
2017	1.700.505.246.607	2.517.003.141.056,17	67%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan tabel 4.9 menunjukkan bahwa selama periode 6 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer sangat tinggi. Pada tahun 2015 tingkat ketergantungan keuangan daerah berada pada rasio yang sangat tinggi yaitu 75%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang masing sangat tergantung terhadap pendapatan transfer.

Tabel 8. Perhitungan Efektivitas Pemerintah Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 - 2017

Tahun	Realisasi Pendapatan	Keterangan		Kriteria Kemampuan
		Target PAD	Rasio Efektivitas	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)*100	(5)
2012	164.389.353.734,76	1.397.450.431.602,18	118%	Sangat Efektif
2013	185.091.678.239,59	1.572.846.963.948,00	107%	Sangat Efektif
2014	304.065.301.093,38	1.799.761.921.253,97	119%	Sangat Efektif
2015	363.963.252.971,96	2.135.865.342.084,20	114%	Sangat Efektif
2016	374.141.185.825,47	2.234.904.907.100,67	108%	Sangat Efektif
2017	521.236.583.750,17	2.534.376.986.170,68	105%	Sangat Efektif

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Namun berdasarkan skala interval menurut Dasril Munir dalam Yumardi dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Jombang sudah sangat efektif dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini terbukti dari kriteria yang yang didapatkan selama 6 periode tersebut. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya yang paling efektif terjadi pada tahun 2014. Berdasarkan hal ini bisa disimpulkan bahwasanya pencapaian tujuan anggaran daerah sudah berhasil.

Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 – 2017

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Keterangan		Kriteria Kemampuan
		Total Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)*100	(5)
2012	1.363.382.391.746,28	1.535.646.851.255,47	88%	Efisien
2013	1.559.047.056.626,78	1.797.064.680.896,77	87%	Efisien
2014	1.780.114.993.045,15	2.029.130.565.410,55	87%	Efisien
2015	2.164.953.026.633,20	2.485.612.912.923,01	87%	Efisien
2016	2.364.581.573.271,18	2.570.651.376.368,24	92%	Efisien
2017	2.401.430.893.002,94	2.762.750.303.184,68	87%	Efisien

Sumber : Data Diolah, 2018

Analisis efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa kabupaten Jombang telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja Kabupaten Jombang yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010 : 166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran.

Dilihat dari tabel 4.11 rasio yang efisien belanja terendah terdapat pada tahun 2013 – 2014 dan 2017, kemudian di tahun 2012 sebesar 88% dan di tahun 2016 terdapat presentase tertinggi yaitu 92%. Namun perlu diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak bisa dikelola untuk kepentingan lain kecuali hanya digunakan dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Berikut tabel penerimaan pendapatan urusan wajib kesehatan :

Tabel 10. Ringkasan Pendapatan RSUD

Tahun	Anggaran
2012	76.000.000.000,00
2013	92.864.792.934,00
2014	115.355.729.276,25
2015	118.000.000.000,00
2016	143.997.610.000,00
2017	197.735.770.668,87

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berikut ini disajikan tabel kontribusi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 :

Tabel 11. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Prosentase Kontribusi
2012	1.439.221.547.802,76	1.363.382.391.746,28	105,6%
2013	1.567.610.980.536,59	1.559.047.056.626,78	100,6%
2014	1.905.860.371.275,38	1.780.114.993.045,15	107%
2015	2.151.287.874.052,96	2.164.953.026.633,20	99,4%
2016	2.257.099.357.781,47	2.364.581.573.271,18	95,5%
2017	2.517.003.141.056,17	2.401.430.893.002,94	105%

Sumber : Data Diolah (2018)

E. Penutup Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Belanja Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah sudah memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah, pembvangunan, dan dinyatakan baik.
- Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dilihat dari Derajat Desentralisasi selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 secara umum dinyatakan kurang baik dengan rata – rata sebesar 14%.
- Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari rasio ketergantungan dari tahun 2012 – 2017 sangat tinggi.
- Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari segi evektifitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, secara umum dinyatakan sangat evektif.

- e. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan efisiensi belanja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebaiknya lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah dan juga Pemerintah Kabupaten Jombang bisa dapat menggali potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Jombang.

Meningkatkan terus kinerja pengelolaan terhadap realisasi APBD, agar Kabupaten Jombang mampu menjadi kota yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Lebih mendalami mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Argi, Ridho. 2011. “ Analisis Belanja Daerah dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009” (Skripsi S-1). Semarang FE Universitas Diponegoro.
- BPKAD Kabupaten Jombang. jombangkab.go.id/index.php/page/detail/bpkad-struktur-organisasi.html (diakses tanggal 1 Agustus 2018)
- Darise Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks.
- Halim. Abdul., 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPF Akademi Manajemen Keuangan Perusahaan YKPN.
- Halim, A, 2002, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M, 2004, *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kusumawardani, Nurul Kamaril. 2006. “ Analisis PAD Atas Besarnya Belanja Operasional Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ” (Skripsi S-1 Progdik Akuntansi). Bandung: FE Universitas Widyatama.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
- Rahim, Syamsuri. 2008. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Membayai Belanja Daerah*, Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 3 No. 2. Makassar : FE Universitas Muslim Indonesia.
- Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era dan Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Universitas Diponegoro Semarang Volume 18 No. 1 Halaman 46-58. Semarang.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utomo, L. P., Asyik, N. F., & Hermanto, S. B. (2017). Belanja Modal Memediasi Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 115-128.